



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN MENTERI LUAR NEGERI**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2021 - 2022
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: IV
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi III DPR RI
Acara Rapat	: 1. Penjelasan Pemerintah atas <i>MLA in Criminal Matters</i> ; 2. Pandangan Umum Fraksi atas <i>MLA in Criminal Matters</i> ; 3. Membahas jadwal dan rencana kerja pembahasan <i>MLA in Criminal Matters</i> ;
Hari / tanggal	: Rabu/ 1 September 2021
Waktu	: Pukul 11.20 – 11.55 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Herman Herry / Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris	: Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir	: 1. 2 (dua) orang Pimpinan Komisi III DPR RI 2. 33 (tiga puluh tiga) Anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI 3. 1 (satu) orang Menteri beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pukul 11.20 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry dengan agenda rapat membahas:

- Penjelasan Pemerintah atas *MLA in Criminal Matters*;
- Pandangan Umum Fraksi atas *MLA in Criminal Matters*;
- Membahas jadwal dan rencana kerja pembahasan *MLA in Criminal Matters*;
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Menkumham menyampaikan Penjelasan Pemerintah atas *MLA in Criminal Matters* diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Pembentukan perjanjian bilateral Republik Indonesia dengan Federasi Rusia untuk mendukung kemitraan strategis kedua negara yang diharapkan dapat segera ditandatangani kedua Kepala Negara.
 - b. Pembentukan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan negara-negara strategis akan mendukung upaya Pemerintah untuk menjadi Anggota *Financial Action Task Force (FATF)*.
 - c. perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia akan semakin memperkuat kerja sama yang ada dan diharapkan dapat mengatasi perbedaan sistem hukum kedua negara.

2. RUU tentang MLA in Criminal Matters mempunyai 17 DIM dengan rekapitulasi sebagai berikut:
 - a. DIM bersifat tetap sebanyak 9
 - b. DIM bersifat substansi sebanyak 3
 - c. DIM bersifat substansi baru sebanyak 1
 - d. DIM bersifat redaksional sebanyak 4

III. KESIMPULAN

1. Komisi III DPR RI dan Pemerintah menyetujui 9 DIM yang bersifat tetap.
2. Komisi III DPR RI dan Pemerintah menyetujui pembentukan Panja RUU tentang MLA in Criminal Matters.
3. Komisi III DPR RI dan Pemerintah menyetujui DIM yang bersifat substansi, substansi baru dan redaksional dibahas didalam Panja.
4. Rapat Kerja menyetujui rancangan jadwal pembahasan.
5. Rapat Kerja menyetujui Sdr. Ir. Pangeran Khairul Saleh sebagai Ketua Panja RUU *MLA in Criminal Matters*.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.55 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA,

HERMAN HERRY
A-238